

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Dr. Nuriyanto A. Daim, S.H., M.H. (2019). *Hukum Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dalam Prespektif Good Governance*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.

DR. Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

R. Soeroso. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Adrian Sutedi, S.H., M.H. (2019). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Jember.

**C. Hasil Penelitian (Skripsi/tesis/disertasi, Jurnal, Laporan Penelitian, Majalah, Koran)**

Haedar Akib. (2014). Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Studi pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa).

*Jurnal Ad'ministrare*, 1(1) 50-61.

Arfandy Wichers Bidara, Herman Nayian dan Novie Revlie Pioh. (2017). Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).

Muhammad Darwis. (2019). Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (Kptsp & Pmd) Kabupaten Mamuju Utara. *Katalogis*, 3(9).

Dani Erlangga. (2018). Pelaksanaan Sosialisasi Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM Dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1) 47-52.

Muhamad Ghifari Ibrahim. (2020). Tingkat Kepatuhan Masyarakat Solo terhadap Regulasi Bangunan (Studi Kasus: Jalan Mojo Solo). *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*, 244.

Ikrima Iffah Sochifah dan Ronny Durrotun Nasihien. (2019). Kepatuhan Masyarakat Di Kabupaten Gresik Dalam Mengurus Izin Mendirikan Bangunan. *Narotama Jurnal Teknik Sipil*, 3(1).

Ellya Rosana. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1) 61-84.

Teodorus Egie Sapultura dan Agung Suprojo. (2019). Implementasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Implementasinya Terhadap Tata Ruang Di Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2).

**D. Sumber Dari Website**

<https://kbbi.web.id/izim-atau-izin>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021.

